

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Masyarakat, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 07 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN
dan
BUPATI SERUYAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	1.345.996.782.712,53
2. Belanja	Rp.	1.452.075.264.430,42
Surplus/(Defisit)	Rp.	(106.078.481.717,89)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	106.078.481.717,89
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan neto	Rp.	106.078.481.717,89
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 266.924.793.712,53 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. | 920.552.928.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | Rp. | 158.519.061.000,00 |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 205.893.132.448,45 |
| b. Retribusi Daerah | Rp. | 16.214.782.761,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp. | 8.559.612.900,95 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | Rp. | 36.257.265.602,13 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|-------------------------|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil | Rp. | 70.383.043.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. | 643.070.738.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. | 207.099.147.000,00 |
| d. Dana Insentif Daerah | Rp. | 0,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 16.534.043.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | Rp. | 106.984.261.000,00 |
| c. Bantuan Keuangan | Rp. | 35.000.000.000,00 |

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- | | | |
|---------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 564.406.047.974,92 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 887.669.216.455,50 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. | 106.078.481.717,89 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp. | 0,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya | Rp. | 106.078.481.717,89 |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah | Rp. | 0,00 |

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|------|
| a. Pembentukan dana cadangan | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah | Rp. | 0,00 |
| c. Pembayaran Utang | Rp. | 0,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah | Rp. | 0,00 |

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah
 Lampiran II : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi
 Lampiran III : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan
 Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program dan kegiatan
 Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselaran dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
 Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
 Lampiran VII : Daftar piutang daerah
 Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah
 Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah
 Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain
 Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
 Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah
 Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan / atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
- program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 27 Desember 2019



Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 27 Desember 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2019 NOMOR 51
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : 09 , 123 / 2019**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sangat perlu pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 80



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 1

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN	1.345.996.782.712,53
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	266.924.793.712,53
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	205.893.132.448,45
4.1.1.06.	Pajak Hotel	262.595.000,00
4.1.1.06.07.	Losmen/ Rumah penginapan/ Pesanggrahan/ Rumah Kos	262.595.000,00
4.1.1.07.	Pajak Restoran	4.516.908.239,00
4.1.1.07.02.	Rumah Makan	119.650.000,00
4.1.1.07.07.	Jasa Boga/ Katering	4.397.258.239,00
4.1.1.08.	Pajak Hiburan	7.475.000,00
4.1.1.08.06.	Sirkus/Akrobat/Sulap	7.475.000,00
4.1.1.09.	Pajak Reklame	210.347.040,00
4.1.1.09.01.	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	173.020.800,00
4.1.1.09.02.	Reklame Kain	13.498.700,00
4.1.1.09.03.	Reklame Melekat/Stiker	252.540,00
4.1.1.09.04.	Reklame Selebaran	575.000,00
4.1.1.09.11.	Reklame Bersinar	23.000.000,00
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan	4.394.676.874,51
4.1.1.10.01.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.143.208.836,00
4.1.1.10.02.	Pajak Penerangan Jalan PLN	3.251.468.038,51
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah	613.680.273,00
4.1.1.12.01.	Pajak Air Tanah	613.680.273,00
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet	71.900.000,00
4.1.1.13.01.	Pajak Sarang Burung Walet	71.900.000,00
4.1.1.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.377.306.057,60
4.1.1.14.01.	Mineral Bukan Logam dan Batuan.	5.377.306.057,60
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.380.686.140,25
4.1.1.15.01.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.380.686.140,25
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	183.057.557.824,09
4.1.1.16.01.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).	183.057.557.824,09
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	16.214.782.761,00
4.1.2.01.	Retribusi Jasa Umum	11.520.805.961,00
4.1.2.01.01.	Retribusi Pelayanan Kesehatan.	10.932.330.961,00
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	14.575.000,00
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	257.000.000,00
4.1.2.01.06.	Retribusi Pelayanan Pasar	56.900.000,00
4.1.2.01.07.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	260.000.000,00
4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	714.626.800,00
4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	345.000.000,00
4.1.2.02.06.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	2.250.000,00
4.1.2.02.08.	Retribusi Rumah Potong Hewan	5.000.000,00
4.1.2.02.09.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	28.000.000,00
4.1.2.02.10.	Retribusi Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga	225.000.000,00
4.1.2.02.18.	Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Alat dan Mesin	67.876.800,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.1.2.02.20.	Retribusi Rumah Dinas	41.500.000,00
4.1.2.08.	Retribusi Perizinan Tertentu	3.979.350.000,00
4.1.2.08.01.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.859.250.000,00
4.1.2.08.05.	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.500.000,00
4.1.2.08.11.	Retribusi Izin Ketenagakerjaan/Bidang Perizinan Tenaga Kerja Asing	117.600.000,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.559.612.900,95
4.1.3.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8.559.612.900,95
4.1.3.01.01.	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD	8.559.612.900,95
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah	36.257.265.602,13
4.1.4.01.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	595.417.345,35
4.1.4.01.02.	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	595.417.345,35
4.1.4.03.	Penerimaan Jasa Giro	19.210.586.009,11
4.1.4.03.01.	Jasa Giro Kas Daerah	19.210.586.009,11
4.1.4.05.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	503.097.027,08
4.1.4.05.01.	Kerugian Uang daerah	503.097.027,08
4.1.4.08.	Pendapatan Denda Pajak	462.422.546,30
4.1.4.08.15.	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	462.422.546,30
4.1.4.17.	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	2.474.527.647,00
4.1.4.17.01.	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	2.474.527.647,00
4.1.4.18.	Pendapatan BLUD	8.958.514.405,00
4.1.4.18.01.	Pendapatan Pelayanan Kesehatan BLUD	8.824.014.405,00
4.1.4.18.04.	Pendapatan BLUD Lainnya	134.500.000,00
4.1.4.19.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4.052.700.622,29
4.1.4.19.01.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4.052.700.622,29
4.2.	DANA PERIMBANGAN	920.552.928.000,00
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	70.383.043.000,00
4.2.1.01.	Bagi Hasil Pajak	34.230.209.000,00
4.2.1.01.01.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.938.659.000,00
4.2.1.01.04.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	4.291.550.000,00
4.2.1.02.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	36.152.834.000,00
4.2.1.02.02.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	16.261.821.000,00
4.2.1.02.04.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	313.652.000,00
4.2.1.02.05.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	19.027.848.000,00
4.2.1.02.07.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00
4.2.1.02.08.	Bagi Hasil dari Gas bumi dan Minyak Bumi	46.723.000,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	643.070.738.000,00
4.2.2.01.	Dana Alokasi Umum	643.070.738.000,00
4.2.2.01.01.	Dana Alokasi Umum	643.070.738.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	207.099.147.000,00
4.2.3.01.	Dana Alokasi Khusus	207.099.147.000,00
4.2.3.01.01.	Dana Alokasi Khusus Reguler	98.359.633.000,00
4.2.3.01.02.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	35.096.350.000,00
4.2.3.01.03.	Dana Alokasi Khusus Afirmasi	28.969.256.000,00
4.2.3.01.05.	Tunjangan Guru Non Sertifikasi	1.203.000.000,00
4.2.3.01.06.	Tunjangan Guru Sertifikasi	23.620.978.000,00
4.2.3.01.07.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.398.400.000,00
4.2.3.01.08.	Bantuan Operasional Kesehatan	9.349.125.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.2.3.01.09.	Akreditasi Puskesmas	633.200.000,00
4.2.3.01.10.	Jaminan Persalinan	865.366.000,00
4.2.3.01.11.	Bantuan Operasional KB	2.932.160.000,00
4.2.3.01.12.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.031.375.000,00
4.2.3.01.14.	Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan	855.300.000,00
4.2.3.01.15.	Dana Pelayanan Kepariwisataaan	785.004.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	158.519.061.000,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	16.534.800.000,00
4.3.1.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	16.534.800.000,00
4.3.1.01.02.	Dana Hibah dari Pemerintah (Dana BOS)	16.534.800.000,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	106.984.261.000,00
4.3.3.05.	Dana Desa (DD)	106.984.261.000,00
4.3.3.05.01.	Dana Desa (DD)	106.984.261.000,00
4.3.5.	Bantuan Keuangan	35.000.000.000,00
4.3.5.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	35.000.000.000,00
4.3.5.01.01.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	35.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.345.996.782.712,53
5.	BELANJA	1.452.075.264.430,42
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	564.001.647.974,92
5.1.1.	Belanja Pegawai	321.579.591.411,85
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	230.272.484.986,97
5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	167.203.753.569,00
5.1.1.01.02.	Tunjangan Keluarga	16.663.947.656,23
5.1.1.01.03.	Tunjangan Jabatan	7.589.274.062,94
5.1.1.01.04.	Tunjangan Fungsional	8.199.104.111,60
5.1.1.01.05.	Tunjangan Fungsional Umum	3.124.552.941,34
5.1.1.01.06.	Tunjangan Beras	11.437.316.833,62
5.1.1.01.07.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	558.852.669,49
5.1.1.01.08.	Pembulatan Gaji	44.046.269,98
5.1.1.01.09.	Iuran Jaminan Kesehatan	5.425.793.501,39
5.1.1.01.10.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	1.831.833.347,48
5.1.1.01.11.	Tunjangan Badan Musyawarah	28.818.100,00
5.1.1.01.12.	Tunjangan Komisi	52.337.900,00
5.1.1.01.13.	Tunjangan Badan Anggaran	31.010.500,00
5.1.1.01.14.	Tunjangan Badan Kehormatan	17.125.300,00
5.1.1.01.15.	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	52.416.100,00
5.1.1.01.16.	Tunjangan Perumahan	2.911.923.062,00
5.1.1.01.19.	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	325.248.000,00
5.1.1.01.21.	Uang Paket	58.132.000,00
5.1.1.01.22.	Tunjangan Transportasi	3.539.499.061,90
5.1.1.01.23.	Tunjangan Reses	1.177.500.000,00
5.1.1.02.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	75.828.930.535,88
5.1.1.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	29.968.844.400,84
5.1.1.02.02.	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	4.270.700.002,04
5.1.1.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja	1.786.505.633,00
5.1.1.02.04.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	3.161.958.750,00
5.1.1.02.05.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	25.221.778.000,00
5.1.1.02.06.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja Daerah	11.419.143.750,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.1.03.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.110.000.000,00
5.1.1.03.01.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.510.000.000,00
5.1.1.03.02.	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.1.05.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	9.724.045.650,40
5.1.1.05.06.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	13.129.750,00
5.1.1.05.07.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	225.845.411,13
5.1.1.05.08.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	373.750,00
5.1.1.05.09.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	10.517.352,00
5.1.1.05.10.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	219.733.843,73
5.1.1.05.12.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	30.684.013,00
5.1.1.05.13.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet	3.595.000,00
5.1.1.05.14.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	268.865.302,88
5.1.1.05.15.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	369.034.352,66
5.1.1.05.16.	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	8.582.266.875,00
5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	644.130.238,60
5.1.1.06.01.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan	436.627.238,60
5.1.1.06.02.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	583.000,00
5.1.1.06.05.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.280.000,00
5.1.1.06.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	2.276.000,00
5.1.1.06.07.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	10.400.000,00
5.1.1.06.15.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	14.380.000,00
5.1.1.06.20.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	90.000,00
5.1.1.06.21.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	200.000,00
5.1.1.06.22.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan	1.120.000,00
5.1.1.06.23.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.000.000,00
5.1.1.06.26.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	154.370.000,00
5.1.1.06.30.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	100.000,00
5.1.1.06.32.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	4.704.000,00
5.1.3.	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00
5.1.3.01.	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00
5.1.3.01.03.	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya	2.000.000.000,00
5.1.4.	Belanja Hibah	23.560.092.202,12
5.1.4.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah	5.050.000.000,00
5.1.4.01.02.	Belanja Hibah Kepada Organisasi Pemerintah	5.050.000.000,00
5.1.4.05.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	13.106.875.202,12
5.1.4.05.01.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	13.106.875.202,12
5.1.4.06.	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan	4.773.000.000,00
5.1.4.06.01.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar Swasta	310.300.000,00
5.1.4.06.02.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Menengah Pertama Swasta	313.400.000,00
5.1.4.06.04.	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta	3.294.000.000,00
5.1.4.06.05.	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	855.300.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.4.07.	Belanja Hibah Kepada Partai Politik	630.217.000,00
5.1.4.07.01.	Belanja Hibah Kepada Partai Politik.	630.217.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	12.176.535.000,00
5.1.5.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	120.000.000,00
5.1.5.01.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	120.000.000,00
5.1.5.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	12.056.535.000,00
5.1.5.03.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat yang Tidak direncanakan	3.530.217.000,00
5.1.5.03.02.	Bantuan Sosial untuk Peningkatan Pendidikan	8.526.318.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	22.210.791.520,95
5.1.6.03.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	22.210.791.520,95
5.1.6.03.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	22.210.791.520,95
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	179.474.637.840,00
5.1.7.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	245.000.000,00
5.1.7.01.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi....	245.000.000,00
5.1.7.03.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	179.229.637.840,00
5.1.7.03.01.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	179.229.637.840,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.1.8.01.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.1.8.01.01.	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	888.073.616.455,50
5.2.1.	Belanja Pegawai	129.498.719.310,66
5.2.1.01.	Honorarium PNS	27.291.697.825,03
5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	6.332.161.300,00
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.189.421.261,03
5.2.1.01.03.	Honorarium Pejabat Pengguna Anggaran	2.060.370.000,00
5.2.1.01.04.	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah/PPK PPKD/ PPK SKPD	1.188.152.000,00
5.2.1.01.05.	Honorarium Pengelola Barang	2.381.200.000,00
5.2.1.01.06.	Honorarium Pengelola	2.453.651.824,00
5.2.1.01.07.	Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan	2.708.640.000,00
5.2.1.01.08.	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan PNS	3.194.617.440,00
5.2.1.01.09.	Honorarium Jasa PNS	20.000.000,00
5.2.1.01.10.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.011.744.000,00
5.2.1.01.11.	Honorarium Tim/ Tenaga Teknis	3.307.090.000,00
5.2.1.01.12.	Honorarium Admin Database Kependudukan	7.200.000,00
5.2.1.01.13.	Honorarium Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL)	6.300.000,00
5.2.1.01.14.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/pengelola Website	163.200.000,00
5.2.1.01.15.	Honorarium Operator dan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi	1.267.950.000,00
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	92.966.110.816,63
5.2.1.02.01.	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	88.487.416.910,63
5.2.1.02.02.	Honorarium Jasa Pelayanan kesehatan Non PNS	2.548.913.906,00
5.2.1.02.03.	Honorarium Jasa Non PNS	36.780.000,00
5.2.1.02.04.	Honorarium Tenaga Kesehatan berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.893.000.000,00
5.2.1.03.	Uang Lembur	5.128.747.940,00
5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	3.555.847.940,00
5.2.1.03.02.	Uang Lembur Non PNS	1.572.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.1.04.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	1.086.000.000,00
5.2.1.04.01.	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	1.086.000.000,00
5.2.1.05.	Belanja Pegawai BOS APBN	3.026.162.729,00
5.2.1.05.01.	Belanja Pegawai BPSP	3.026.162.729,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	364.933.664.561,34
5.2.2.01.	Belanja Bahan Paka Habis	16.052.686.567,14
5.2.2.01.01.	Belanja alat tulis kantor	5.274.357.820,48
5.2.2.01.03.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	661.054.000,00
5.2.2.01.04.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	582.733.000,00
5.2.2.01.05.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.157.778.500,00
5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.304.365.450,00
5.2.2.01.07.	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	33.950.000,00
5.2.2.01.08.	Belanja pengisian tabung gas	335.963.057,00
5.2.2.01.09.	Belanja Spanduk/Baleho/Umbul-Umbul/Bendera/Lambang Garuda	2.176.221.736,66
5.2.2.01.10.	Belanja Logistik Kantor	971.172.807,00
5.2.2.01.11.	Belanja Logistik Rumah Tangga KDH dan WKDH	1.044.000.000,00
5.2.2.01.12.	Belanja Piala, Penghargaan, Karangan Bunga dan Souvenir	666.450.280,00
5.2.2.01.13.	Belanja Pengadaan Tas	384.362.916,00
5.2.2.01.14.	Belanja Pengadaan Perlengkapan Dapur (Barang Pecah Belah/Taplak Meja/Alat Rumah Tangga)	412.022.000,00
5.2.2.01.15.	Belanja pengadaan sajadah/mukena/peci	5.050.000,00
5.2.2.01.16.	Belanja Bantal/Guling, Sprei dan Kasur	291.550.000,00
5.2.2.01.17.	Belanja Kabel	9.455.000,00
5.2.2.01.19.	Belanja Logistik Kebencanaan	45.450.000,00
5.2.2.01.20.	Belanja Pengadaan Karpet	149.550.000,00
5.2.2.01.21.	Belanja Logistik Rumah Tangga Ketua dan Wakil DPRD	547.200.000,00
5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	9.867.534.627,00
5.2.2.02.01.	Belanja bahan baku bangunan	2.003.220.050,00
5.2.2.02.02.	Belanja bahan/bibit tanaman	683.950.000,00
5.2.2.02.03.	Belanja bibit ternak/ Ikan	85.000.000,00
5.2.2.02.04.	Belanja bahan obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan	3.929.195.252,00
5.2.2.02.05.	Belanja bahan kimia	612.111.000,00
5.2.2.02.07.	Belanja Pengadaan Sampel/ Produk	28.418.840,00
5.2.2.02.08.	Belanja Bahan Percontohan/ Praktek	595.343.500,00
5.2.2.02.09.	Belanja Peralatan Permainan Edukasi	380.780.000,00
5.2.2.02.10.	Belanja Pupuk	56.453.500,00
5.2.2.02.11.	Belanja Bahan, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	272.707.500,00
5.2.2.02.12.	Belanja Pengadaan/ Pembuatan Papan Nama	114.800.000,00
5.2.2.02.13.	Belanja Bahan Laboratorium dan Pendukung Pemeriksaan laboratorium	491.400.985,00
5.2.2.02.14.	Belanja Pakan Ternak/ Ikan	162.500.000,00
5.2.2.02.15.	Belanja Pengadaan Bingkai/Pigura	112.250.000,00
5.2.2.02.17.	Belanja Pengadaan Gorden	339.404.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	51.683.307.897,06
5.2.2.03.01.	Belanja telepon	312.461.726,00
5.2.2.03.02.	Belanja air	718.328.588,14
5.2.2.03.03.	Belanja listrik	5.965.462.475,00
5.2.2.03.05.	Belanja surat kabar/majalah	1.571.196.387,00
5.2.2.03.06.	Belanja kawat/faksimili/internet	2.424.718.138,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.03.07.	Belanja paket/pengiriman	139.355.314,00
5.2.2.03.08.	Belanja Sertifikasi	167.500.000,00
5.2.2.03.09.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	16.154.933,92
5.2.2.03.12.	Belanja Jasa Kerja	11.042.232.050,00
5.2.2.03.13.	Biaya Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi	18.397.015.500,00
5.2.2.03.14.	Belanja Jasa Instruktur/ Tenaga Ahli dan Narasumber	5.638.240.000,00
5.2.2.03.15.	Belanja Jasa Administrasi Perkantoran	36.735.307,00
5.2.2.03.16.	Belanja Dekorasi, Publikasi dan Dokumentasi	1.297.155.357,00
5.2.2.03.17.	Belanja Jasa Kunjungan Dokter Spesialis	60.000.000,00
5.2.2.03.18.	Belanja Jasa Cuci Cetak Foto	131.847.221,00
5.2.2.03.19.	Belanja Uji Laboratorium/ Kalibrasi	218.877.400,00
5.2.2.03.20.	Belanja TV Kabel	67.747.000,00
5.2.2.03.21.	Belanja Jasa Website/Aplikasi	186.000.000,00
5.2.2.03.22.	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	381.000.000,00
5.2.2.03.24.	Belanja Klaim Jampersal	684.800.000,00
5.2.2.03.25.	Belanja Jasa Konsultan Penilaian/ Appraisal	1.512.600.000,00
5.2.2.03.26.	Belanja Jasa Pendampingan	294.255.500,00
5.2.2.03.28.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	150.000.000,00
5.2.2.03.30.	Belanja Dokumentasi	95.025.000,00
5.2.2.03.31.	Belanja Jasa Sewa VPS	149.600.000,00
5.2.2.03.32.	Belanja Kontribusi	25.000.000,00
5.2.2.04.	Belanja Premi Asuransi	21.152.097.225,00
5.2.2.04.02.	Belanja Premi Asuransi Aset dan Barang Milik Daerah	100.000.000,00
5.2.2.04.03.	Belanja Premi Jamkesda	20.971.488.000,00
5.2.2.04.04.	Belanja Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	80.609.225,00
5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	14.372.007.290,56
5.2.2.05.01.	Belanja Jasa Service	1.982.100.500,00
5.2.2.05.02.	Belanja Penggantian Suku Cadang/ Ban	3.665.153.050,00
5.2.2.05.03.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	8.087.788.000,00
5.2.2.05.04.	Belanja Jasa KIR	5.900.000,00
5.2.2.05.05.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	628.145.740,56
5.2.2.05.07.	Belanja BBNKB dan PKB Kendaraan Bermotor	2.920.000,00
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.169.503.202,18
5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.154.339.835,18
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	1.787.351.967,00
5.2.2.06.03.	Belanja Penjilidan	227.811.400,00
5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	885.299.000,00
5.2.2.07.01.	Belanja Jasa Sewa Rumah Dokter Spesialis	56.400.000,00
5.2.2.07.02.	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	528.374.000,00
5.2.2.07.03.	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	278.525.000,00
5.2.2.07.04.	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	22.000.000,00
5.2.2.09.	Belanja Sewa Alat Berat	62.000.000,00
5.2.2.09.01.	Belanja sewa Eskavator	62.000.000,00
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	981.040.000,00
5.2.2.10.01.	Belanja sewa meja kursi	33.015.000,00
5.2.2.10.05.	Belanja sewa tenda	51.600.000,00
5.2.2.10.06.	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	36.250.000,00
5.2.2.10.07.	Belanja Sewa Sound System	546.475.000,00
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Taplak Meja	1.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.10.10.	Belanja Sewa Peralatan, Perlengkapan Musik, Tari dan Kesenian Daerah/ Tradisional	190.500.000,00
5.2.2.10.11.	Belanja Sewa Tenda / Kursi	121.700.000,00
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	24.301.847.802,00
5.2.2.11.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.376.032.582,00
5.2.2.11.02.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.902.111.000,00
5.2.2.11.03.	Belanja makanan dan minuman tamu	754.605.100,00
5.2.2.11.04.	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.025.099.120,00
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	244.000.000,00
5.2.2.12.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.535.526.925,00
5.2.2.12.03.	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	48.500.000,00
5.2.2.12.04.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.082.099.925,00
5.2.2.12.06.	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	137.900.000,00
5.2.2.12.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan	93.200.000,00
5.2.2.12.11.	Belanja Atribut Pakaian Dinas Harian	173.827.000,00
5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	2.166.329.000,00
5.2.2.13.01.	Belanja pakaian kerja lapangan	1.267.879.000,00
5.2.2.13.03.	Belanja Atribut Pakaian Kerja	898.450.000,00
5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.042.185.925,00
5.2.2.14.01.	Belanja pakaian KORPRI	60.750.000,00
5.2.2.14.02.	Belanja pakaian adat daerah	128.690.000,00
5.2.2.14.03.	Belanja pakaian batik tradisional	1.225.010.000,00
5.2.2.14.04.	Belanja pakaian olahraga	3.111.520.925,00
5.2.2.14.05.	Belanja Pakaian Pasukan Pengibar Bendera	232.500.000,00
5.2.2.14.06.	Belanja Atribut Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	924.420.000,00
5.2.2.14.07.	Belanja Pakaian Peserta	495.075.000,00
5.2.2.14.08.	Belanja Pakaian khusus hari-hari tertentu	1.864.220.000,00
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	100.289.008.519,20
5.2.2.15.01.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.413.802.167,47
5.2.2.15.02.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	42.603.795.776,90
5.2.2.15.03.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	60.000.000,00
5.2.2.15.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.211.410.574,83
5.2.2.18.	Belanja Pemeliharaan	11.642.467.175,00
5.2.2.18.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	303.975.000,00
5.2.2.18.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.788.287.536,00
5.2.2.18.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	938.650.000,00
5.2.2.18.05.	Belanja Pemeliharaan Jembatan	3.310.000.000,00
5.2.2.18.06.	Belanja Pemeliharaan Drainase	305.000.000,00
5.2.2.18.07.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik	180.100.000,00
5.2.2.18.08.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	980.230.319,00
5.2.2.18.09.	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Minum	375.000.000,00
5.2.2.18.10.	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas	175.500.000,00
5.2.2.18.11.	Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja	1.450.202.000,00
5.2.2.18.12.	Belanja Pemeliharaan Komputer, Printer dan Jaringan	813.601.867,00
5.2.2.18.14.	Belanja Pemeliharaan Mesin/ Alat-alat Bengkel	28.900.000,00
5.2.2.18.15.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	2.000.000,00
5.2.2.18.16.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Studio	36.480.000,00
5.2.2.18.17.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran	60.000.000,00
5.2.2.18.18.	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	20.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.2.18.19.	Belanja Pemeliharaan Halaman dan Taman	856.090.453,00
5.2.2.18.20.	Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata	18.450.000,00
5.2.2.19.	Belanja Jasa Konsultansi	2.522.829.000,00
5.2.2.19.01.	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	2.522.829.000,00
5.2.2.21.	Belanja Bantuan Sosial/ Hibah Barang/Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	59.746.229.421,00
5.2.2.21.01.	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Individu	374.500.000,00
5.2.2.21.02.	Belanja Hibah Barang/ Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	59.371.729.421,00
5.2.2.23.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	421.120.000,00
5.2.2.23.01.	Belanja beasiswa tugas belajar D3	141.280.000,00
5.2.2.23.02.	Belanja beasiswa tugas belajar S1	188.600.000,00
5.2.2.23.03.	Belanja beasiswa tugas belajar S2	91.240.000,00
5.2.2.24.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	11.057.488.576,20
5.2.2.24.01.	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	5.169.391.015,00
5.2.2.24.02.	Belanja sosialisasi	25.600.000,00
5.2.2.24.03.	Belanja bimbingan teknis	5.862.497.561,20
5.2.2.27.	Belanja Barang dan Jasa Bos APBN	11.791.492.004,00
5.2.2.27.01.	Belanja Persediaan BOS/BPSP	4.660.598.531,75
5.2.2.27.02.	Belanja Pemeliharaan BOS/BPSP	761.873.972,25
5.2.2.27.03.	Belanja Jasa BOS/BPSP	5.591.824.086,24
5.2.2.27.04.	Belanja Perjalanan Dinas BOS/BPSP	777.195.413,76
5.2.2.28	Uang Untuk Perlombaan	501.350.000,00
5.2.2.28.01	Uang Untuk Pemenang Perlombaan	501.350.000,00
5.2.2.29.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	8.690.314.405,00
5.2.2.29.01.	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Kuala Pembuang	8.690.314.405,00
5.2.3.	BELANJA MODAL	393.641.232.583,50
5.2.3.06.	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan	111.000.000,00
5.2.3.06.02.	Belanja modal Pengadaan Kolam Air Tawar	111.000.000,00
5.2.3.11.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.715.000.000,00
5.2.3.11.03.	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri	500.000.000,00
5.2.3.11.10.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Kantor	2.050.000.000,00
5.2.3.11.14.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Sarana Pendidikan Taman Kanak-Kanak	165.000.000,00
5.2.3.14.	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	5.303.950.000,00
5.2.3.14.21.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air	20.000.000,00
5.2.3.14.22.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Pemadam	5.283.950.000,00
5.2.3.16.	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	157.466.630,00
5.2.3.16.05.	Belanja modal Pengadaan Pompa	7.000.000,00
5.2.3.16.06.	Belanja modal Pengadaan Mesin Bor	42.966.630,00
5.2.3.16.12.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit	107.500.000,00
5.2.3.17.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	22.513.359.986,00
5.2.3.17.01.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	81.800.000,00
5.2.3.17.04.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.375.000.000,00
5.2.3.17.05.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.016.560.000,00
5.2.3.17.09.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon	9.160.000.000,00
5.2.3.17.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	380.000.000,00
5.2.3.17.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Boks	599.999.986,00

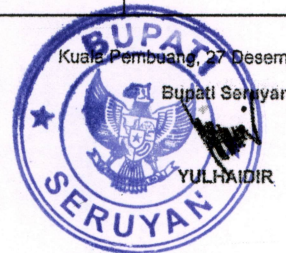
Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.17.15.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up	1.950.000.000,00
5.2.3.17.16.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans	1.350.000.000,00
5.2.3.17.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	4.600.000.000,00
5.2.3.18.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	200.000.000,00
5.2.3.18.03.	Belanja Modal Pengadaan Aksesoris Kendaraan	200.000.000,00
5.2.3.19.	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	180.000.000,00
5.2.3.19.07.	Belanja Modal Pengadaan Motor Tempel (Motor Boat)	180.000.000,00
5.2.3.23.	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	218.900.200,00
5.2.3.23.05.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)	15.000.000,00
5.2.3.23.07.	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	195.000.000,00
5.2.3.23.09.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu	8.900.200,00
5.2.3.24.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	151.684.800,00
5.2.3.24.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding	64.500.000,00
5.2.3.24.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	8.250.000,00
5.2.3.24.16.	Belanja Modal Pengadaan GPS	78.934.800,00
5.2.3.25.	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	165.000.000,00
5.2.3.25.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan	165.000.000,00
5.2.3.26.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	333.700.000,00
5.2.3.26.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	10.000.000,00
5.2.3.26.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium	265.000.000,00
5.2.3.26.07.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	58.700.000,00
5.2.3.27.	Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.337.257.000,00
5.2.3.27.01.	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik	25.000.000,00
5.2.3.27.03.	Belanja modal Pengadaan Mesin Fotocopy	105.000.000,00
5.2.3.27.05.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	95.400.000,00
5.2.3.27.06.	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00
5.2.3.27.07.	Belanja Modal Pengadaan LCD/Infocus/OHP dan Perlengkapannya	368.555.000,00
5.2.3.27.08.	Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman	238.000.000,00
5.2.3.27.11.	Belanja Modal Pengadaan Almari	70.320.000,00
5.2.3.27.12.	Belanja Modal Pengadaan Brankas	20.000.000,00
5.2.3.27.13.	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	40.329.000,00
5.2.3.27.15.	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu (Jam Dinding)	36.750.000,00
5.2.3.27.16.	Belanja Modal Pengadaan AC	930.001.000,00
5.2.3.27.17.	Belanja Modal Pengadaan TV/DVD	158.650.000,00
5.2.3.27.18.	Belanja Modal Pengadaan Teralis/Gorden	328.845.000,00
5.2.3.27.19.	Belanja Modal Pengadaan Sumur Bor	111.000.000,00
5.2.3.27.21.	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	101.950.000,00
5.2.3.27.22.	Belanja Modal Pengadaan Tenda	363.000.000,00
5.2.3.27.23.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Diesel/ Mesin Genset	822.000.000,00
5.2.3.27.24.	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera, Spanduk, Umbul-umbul dan Baleho	123.030.000,00
5.2.3.27.25.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu / trolley kebersihan	12.000.000,00
5.2.3.27.26.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	42.500.000,00
5.2.3.27.27.	Belanja Modal Pengadaan Profil Tank/ Tandon Air	295.000.000,00
5.2.3.27.28.	Belanja Modal Pengadaan Podium	27.277.000,00
5.2.3.27.29.	Belanja Modal Pengadaan Permadani/ Karpas	270.250.000,00
5.2.3.27.30.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	7.000.000,00
5.2.3.27.32.	Belanja Modal Pengadaan Selang Pemadam Kebakaran	4.520.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.27.38.	Belanja Modal Pengadaan Partisi Ruangan	222.400.000,00
5.2.3.28.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.666.738.650,00
5.2.3.28.01.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	1.303.078.650,00
5.2.3.28.02.	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	1.500.000,00
5.2.3.28.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih	11.000.000,00
5.2.3.28.04.	Belanja modal Pengadaan Lemari Es	46.280.000,00
5.2.3.28.05.	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	46.550.000,00
5.2.3.28.06.	Belanja modal Pengadaan Tabung Gas	2.800.000,00
5.2.3.28.07.	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	830.680.000,00
5.2.3.28.08.	Belanja Modal Pengadaan Tangga Aluminium	91.100.000,00
5.2.3.28.09.	Belanja Modal Pengadaan Lemari Makan / Rak Piring	23.500.000,00
5.2.3.28.10.	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	47.750.000,00
5.2.3.28.11.	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	12.000.000,00
5.2.3.28.14.	Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias	250.500.000,00
5.2.3.29.	Belanja modal Pengadaan Komputer dan Jaringan	9.211.370.670,00
5.2.3.29.01.	Belanja modal Pengadaan Komputer/PC	1.377.829.020,00
5.2.3.29.02.	Belanja modal Pengadaan Mainframe/Server	583.000.000,00
5.2.3.29.03.	Belanja modal Pengadaan Laptop/Note Book	1.396.695.000,00
5.2.3.29.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer / PC	1.930.000.000,00
5.2.3.29.05.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer	48.000.000,00
5.2.3.29.06.	Belanja Modal Pengadaan Printer	851.132.000,00
5.2.3.29.07.	Belanja Modal Pengadaan Scanner	584.598.000,00
5.2.3.29.08.	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	7.770.000,00
5.2.3.29.10.	Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer	177.138.650,00
5.2.3.29.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kelengkapan, Hardware Komputer/Server/Laptop (Mouse, Keyboard, Hardisk, Memory, Procesor dan Power Supply)	82.708.000,00
5.2.3.29.14.	Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi	1.300.000.000,00
5.2.3.29.15.	Belanja Modal Pengadaan Media Pendidikan	872.500.000,00
5.2.3.30.	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat/Makan	2.171.631.625,00
5.2.3.30.01.	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja	456.743.000,00
5.2.3.30.02.	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat	60.000.000,00
5.2.3.30.03.	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja	522.276.000,00
5.2.3.30.04.	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat	252.200.000,00
5.2.3.30.06.	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu	20.000.000,00
5.2.3.30.07.	Belanja modal Pengadaan Lemari/Rak Buku/Arsip/Bupet	415.865.625,00
5.2.3.30.08.	Belanja Modal Pengadaan Sofa	257.650.000,00
5.2.3.30.09.	Belanja Modal Pengadaan Kursi/Meja Makan	2.750.000,00
5.2.3.30.11.	Belanja Modal Kursi Tunggu	78.247.000,00
5.2.3.30.13.	Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur	105.900.000,00
5.2.3.31.	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	1.066.640.000,00
5.2.3.31.01.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.000.000,00
5.2.3.31.03.	Belanja modal Pengadaan Kamera	458.950.000,00
5.2.3.31.04.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak	8.000.000,00
5.2.3.31.06.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	56.000.000,00
5.2.3.31.07.	Belanja Modal Pengadaan Handycam	12.000.000,00
5.2.3.31.08.	Belanja Modal Pengadaan Sound System	113.300.000,00
5.2.3.31.09.	Belanja Modal Pengadaan CCTV	232.500.000,00
5.2.3.31.10.	Belanja Modal Pengadaan Megaphone/Pengeras Suara	83.390.000,00
5.2.3.31.11.	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Alat Studio	72.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.32.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	1.159.440.000,00
5.2.3.32.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	50.000.000,00
5.2.3.32.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	28.500.000,00
5.2.3.32.08.	Belanja modal Pengadaan Handy Talky	200.940.000,00
5.2.3.32.09.	Belanja Modal pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	880.000.000,00
5.2.3.33.	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	7.000.000,00
5.2.3.33.20.	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena	7.000.000,00
5.2.3.34.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	19.004.373.622,00
5.2.3.34.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.846.863.131,00
5.2.3.34.04.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata	61.000.000,00
5.2.3.34.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen	2.533.328.645,00
5.2.3.34.08.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	5.871.519.530,00
5.2.3.34.09.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.507.934.744,00
5.2.3.34.20.	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	6.183.727.572,00
5.2.3.35.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	3.621.550.654,00
5.2.3.35.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.191.852.990,00
5.2.3.35.07.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan Pemberantasan Penyakit Menular	1.429.697.664,00
5.2.3.36.	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.637.085.920,00
5.2.3.36.06.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	200.000.000,00
5.2.3.36.08.	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan	500.000.000,00
5.2.3.36.14.	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	1.937.085.920,00
5.2.3.37.	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	4.885.360.000,00
5.2.3.37.01.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia	270.000.000,00
5.2.3.37.02.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika	199.700.000,00
5.2.3.37.03.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	735.000.000,00
5.2.3.37.05.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah	200.000.000,00
5.2.3.37.07.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS	442.500.000,00
5.2.3.37.10.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	1.988.000.000,00
5.2.3.37.11.	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	871.000.000,00
5.2.3.37.14.	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ Permainan Edukatif	179.160.000,00
5.2.3.40.	Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	1.600.000,00
5.2.3.40.02.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja	1.600.000,00
5.2.3.48.	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	8.000.000,00
5.2.3.48.01.	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	8.000.000,00
5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.180.914.781,50
5.2.3.49.01.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	7.007.775.950,00
5.2.3.49.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang	362.000.000,00
5.2.3.49.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	3.890.250.000,00
5.2.3.49.06.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.529.600.000,00
5.2.3.49.08.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	83.250.000,00
5.2.3.49.09.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.372.000.000,00
5.2.3.49.10.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	13.018.831.612,50
5.2.3.49.11.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	770.000.000,00
5.2.3.49.12.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.457.191.220,00
5.2.3.49.13.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	1.653.900.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.49.14.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	386.000.000,00
5.2.3.49.17.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun/Halte Bus	100.440.000,00
5.2.3.49.19.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan	2.294.250.000,00
5.2.3.49.27.	Belanja Modal Pembangunan Halaman, Taman dan Areal Masuk Kantor	2.948.300.000,00
5.2.3.49.29.	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Perikanan	10.000.000.000,00
5.2.3.49.30.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pagar	1.307.125.999,00
5.2.3.50.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	17.026.163.890,00
5.2.3.50.04.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	659.450.000,00
5.2.3.50.09.	Belanja Modal Pengadaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	16.366.713.890,00
5.2.3.57.	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	210.000.000,00
5.2.3.57.01.	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	210.000.000,00
5.2.3.58.	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	226.495.000,00
5.2.3.58.01.	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	40.000.000,00
5.2.3.58.02.	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	186.495.000,00
5.2.3.60.	Belanja modal Pengadaan/ Pembangunan Jalan	178.964.175.513,00
5.2.3.60.05.	Belanja modal Pengadaan Jalan	178.964.175.513,00
5.2.3.61.	Belanja modal Pengadaan Jembatan	9.212.000.000,00
5.2.3.61.09.	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	200.000.000,00
5.2.3.61.10.	Belanja Modal Pengadaan Box Culvert	9.012.000.000,00
5.2.3.62.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	16.445.093.000,00
5.2.3.62.02.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Jaringan Irigasi	16.445.093.000,00
5.2.3.68.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	6.236.611.500,00
5.2.3.68.03.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	423.122.000,00
5.2.3.68.05.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	200.000.000,00
5.2.3.68.06.	Belanja Modal Pengadaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	5.613.489.500,00
5.2.3.69.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	676.816.775,00
5.2.3.69.03.	Belanja Modal Pengadaan Pelabuhan Laut/Dermaga Sungai	676.816.775,00
5.2.3.70.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	134.400.000,00
5.2.3.70.02.	Belanja modal Pengadaan Perpipaan Sumber Air /Mata Air	90.000.000,00
5.2.3.70.05.	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku	44.400.000,00
5.2.3.74.	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	166.400.000,00
5.2.3.74.12.	Belanja Modal Instalasi / Pemasangan Listrik	166.400.000,00
5.2.3.79.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	144.300.000,00
5.2.3.79.05.	Belanja Modal Pengadaan Tower/ Menara Air	144.300.000,00
5.2.3.80.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	705.000.000,00
5.2.3.80.03.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik	705.000.000,00
5.2.3.81.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon	35.000.000,00
5.2.3.81.01.	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah	35.000.000,00
5.2.3.83.	Belanja modal Pengadaan Buku	4.230.000.000,00
5.2.3.83.01.	Belanja modal Pengadaan Buku Umum, Peraturan/Perundang Undangan	30.000.000,00
5.2.3.83.10.	Belanja Modal Buku/ Masterplan	20.000.000,00
5.2.3.83.11.	Belanja Modal Buku Pengayaan, Referensi, Panduan Pendidik)	4.180.000.000,00
5.2.3.85.	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	100.000.000,00
5.2.3.85.01.	Belanja modal Pengadaan Peta	100.000.000,00
5.2.3.86.	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	15.000.000,00
5.2.3.86.03.	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	15.000.000,00
5.2.3.89.	Belanja modal Pengadaan Tanaman/ Pembangunan Kebun	40.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.2.3.89.04.	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias	40.000.000,00
5.2.3.91.	Belanja Modal Bangunan Konstruksi/ Papan Kantor/ Bundaran	6.219.607.650,00
5.2.3.91.01.	Belanja Modal Pembangunan Papan Nama Dinas/Badan/Kantor	61.100.000,00
5.2.3.91.03.	Belanja Modal Pembangunan Bundaran	2.050.000.000,00
5.2.3.91.04.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Fasilitas Umum	4.108.507.650,00
5.2.3.93.	Belanja Modal Masterplan/ Studi/ Perencanaan	11.859.799.450,00
5.2.3.93.01.	Belanja Modal Masterplan.	2.250.000.000,00
5.2.3.93.02.	Belanja Modal Studi/ Perencanaan	9.609.799.450,00
5.2.3.94.	Belanja Modal Bos APBN	1.717.145.267,00
5.2.3.94.01.	Belanja Modal Alat dan Mesin BOS	1.004.789.200,00
5.2.3.94.02.	Belanja Modal Aset dan Lainnya BOS	712.356.067,00
5.2.3.95.	Belanja Modal BLUD	268.200.000,00
5.2.3.95.01.	Belanja Modal BLUD RSUD Kuala Pembuang	268.200.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.452.075.264.430,42
	SURPLUS/(DEFISIT)	(106.078.481.717,89)
6.	PEMBIAYAAN	106.078.481.717,89
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.078.481.717,89
6.1.1.	Penggunaan SILPA	106.078.481.717,89
6.1.1.02.	SILPA DAU/PAD	55.543.356.717,89
6.1.1.02.01.	SILPA Dana Alokasi Umum / Pendapatan Asli Daerah	55.543.356.717,89
6.1.1.06.	Silpa DBH-DR.	50.535.125.000,00
6.1.1.06.01.	Silpa DBH-DR	50.535.125.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	106.078.481.717,89
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0
	PEMBIAYAAN NETO	106.078.481.717,89
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0



Kuala Pembuang, 27 Desember 2019

Bupati Seruyan

YULHAIDIR

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman 1

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	25.905.373.013,00	208.148.487.641,35	558.669.864.167,92	766.818.351.809,27
1.01.	PENDIDIKAN	29.000.000,00	147.532.593.022,00	109.997.776.570,46	257.530.369.592,46
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	29.000.000,00	147.532.593.022,00	109.997.776.570,46	257.530.369.592,46
1.02.	KESEHATAN	22.376.373.013,00	43.783.333.474,43	122.484.308.735,86	166.267.642.210,29
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	3.008.908.297,00	28.988.417.843,00	72.357.942.984,86	101.346.360.827,86
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	8.958.514.405,00	9.515.657.323,80	23.584.075.677,00	33.099.733.000,80
1.02.03.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	10.408.950.311,00	5.279.258.307,63	26.542.290.074,00	31.821.548.381,63
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.500.000.000,00	6.513.384.537,73	289.042.482.839,60	295.555.867.377,33
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.500.000.000,00	6.513.384.537,73	289.042.482.839,60	295.555.867.377,33
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	2.431.292.589,73	16.742.598.200,00	19.173.890.789,73
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	2.431.292.589,73	16.742.598.200,00	19.173.890.789,73
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	5.554.066.506,68	15.681.841.236,00	21.235.907.742,68
1.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	-	3.406.245.148,05	10.926.274.625,00	14.332.519.773,05
1.05.02.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	2.147.821.358,63	4.755.566.611,00	6.903.387.969,63
1.06.	SOSIAL	-	2.333.817.510,78	4.720.856.586,00	7.054.674.096,78
1.06.01.	DINAS SOSIAL	-	2.333.817.510,78	4.720.856.586,00	7.054.674.096,78
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	1.061.350.000,00	35.893.567.335,28	77.697.167.005,18	113.590.734.340,46
2.01.	TENAGA KERJA	117.600.000,00	2.893.669.181,40	3.365.558.161,91	6.259.227.343,31
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	117.600.000,00	2.893.669.181,40	3.365.558.161,91	6.259.227.343,31
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	3.490.679.700,75	5.248.223.131,00	8.738.902.831,75
2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	3.490.679.700,75	5.248.223.131,00	8.738.902.831,75
2.03.	PANGAN	6.500.000,00	6.163.515.768,03	6.936.482.685,87	13.099.998.453,90
2.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.500.000,00	6.163.515.768,03	6.936.482.685,87	13.099.998.453,90
2.04.	PERTANAHAN	-	-	4.138.190.000,00	4.138.190.000,00
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	-	4.138.190.000,00	4.138.190.000,00
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	-	2.842.282.559,00	10.471.272.033,48	13.313.554.592,48
2.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	2.842.282.559,00	10.471.272.033,48	13.313.554.592,48
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3.435.863.050,13	5.022.358.325,00	8.458.221.375,13
2.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3.435.863.050,13	5.022.358.325,00	8.458.221.375,13
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	2.192.201.926,03	8.335.574.920,00	10.527.776.846,03
2.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	2.192.201.926,03	8.335.574.920,00	10.527.776.846,03
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	4.709.488.000,00	4.709.488.000,00
2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	4.709.488.000,00	4.709.488.000,00
2.09.	PERHUBUNGAN	545.000.000,00	3.085.623.164,35	8.160.422.506,00	11.246.045.670,35
2.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	545.000.000,00	3.085.623.164,35	8.160.422.506,00	11.246.045.670,35
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	2.707.491.565,73	6.387.739.545,00	9.095.231.110,73
2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	2.707.491.565,73	6.387.739.545,00	9.095.231.110,73
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	145.000.000,00	2.164.947.785,43	3.238.744.318,00	5.403.692.103,43
2.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	145.000.000,00	2.164.947.785,43	3.238.744.318,00	5.403.692.103,43

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
2.12.	PENANAMAN MODAL	-	2.686.010.741,73	2.878.615.428,92	5.564.626.170,65
2.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	2.686.010.741,73	2.878.615.428,92	5.564.626.170,65
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	247.250.000,00	2.735.601.312,50	4.760.349.332,00	7.495.950.644,50
2.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	247.250.000,00	2.735.601.312,50	4.760.349.332,00	7.495.950.644,50
2.14.	STATISTIK	-	-	54.900.000,00	54.900.000,00
2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	-	54.900.000,00	54.900.000,00
2.15.	PERSANDIAN	-	-	-	-
2.16.	KEBUDAYAAN	-	-	1.193.430.000,00	1.193.430.000,00
2.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	1.193.430.000,00	1.193.430.000,00
2.17.	PERPUSTAKAAN	-	1.495.680.580,20	2.322.689.818,00	3.818.370.398,20
2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	1.495.680.580,20	2.322.689.818,00	3.818.370.398,20
2.18.	KEARSIPAN	-	-	473.128.800,00	473.128.800,00
2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	473.128.800,00	473.128.800,00
3.	URUSAN PILIHAN	70.376.800,00	2.375.134.413,28	60.357.781.401,00	62.732.915.814,28
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	70.376.800,00	2.375.134.413,28	17.044.185.446,00	19.419.319.859,28
3.01.01.	DINAS PERIKANAN	70.376.800,00	2.375.134.413,28	17.044.185.446,00	19.419.319.859,28
3.02.	PARIWISATA	-	-	4.213.854.500,00	4.213.854.500,00
2.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	4.213.854.500,00	4.213.854.500,00
3.03.	PERTANIAN	-	-	11.616.448.235,00	11.616.448.235,00
2.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	-	-	11.616.448.235,00	11.616.448.235,00
3.04.	KEHUTANAN	-	-	14.750.200.000,00	14.750.200.000,00
2.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	14.750.200.000,00	14.750.200.000,00
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
3.06.	PERDAGANGAN	-	-	1.947.803.220,00	1.947.803.220,00
2.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	1.947.803.220,00	1.947.803.220,00
3.07.	PERINDUSTRIAN	-	-	10.583.290.000,00	10.583.290.000,00
2.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	-	-	10.583.290.000,00	10.583.290.000,00
3.08.	TRANSMIGRASI	-	-	202.000.000,00	202.000.000,00
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	-	202.000.000,00	202.000.000,00
4.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.318.959.682.899,53	315.753.217.843,33	150.923.935.917,40	466.677.153.760,73
4.01.	PERENCANAAN	-	3.172.727.475,08	10.300.250.636,00	13.472.978.111,08
4.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	3.172.727.475,08	10.300.250.636,00	13.472.978.111,08
4.02.	KEUANGAN	1.318.010.842.533,53	261.303.615.646,12	28.601.742.120,03	289.905.357.766,15
4.02.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.111.993.402.904,78	247.499.971.237,30	24.497.964.358,03	271.997.935.595,33
4.02.02.	BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH	206.017.439.628,75	13.803.644.408,82	4.103.777.762,00	17.907.422.170,82
4.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	3.880.798.803,00	7.849.822.907,00	11.730.621.710,00
4.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	3.880.798.803,00	7.849.822.907,00	11.730.621.710,00
4.04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
4.05.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	204.250.000,00	28.587.785.985,68	61.770.921.012,56	90.358.706.998,24
4.05.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	14.487.871.864,40	-	14.487.871.864,40
4.05.04.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	814.564.115,35	-	814.564.115,35
4.02.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	3.155.689.000,00	3.155.689.000,00
4.05.01.	SEKRETARIAT DPRD	-	2.632.290.477,63	32.921.503.900,56	35.553.794.378,19
4.05.03.	SEKRETARIAT DAERAH	204.250.000,00	10.653.059.528,30	25.693.728.112,00	36.346.787.640,30

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Pendapatan	Belanja		
			Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5	6
4.06.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	2.769.964.256,93	8.320.010.000,00	11.089.974.256,93
4.06.01.	INSPEKTORAT	-	2.769.964.256,93	8.320.010.000,00	11.089.974.256,93
4.07.	PEMERINTAHAN UMUM	744.590.366,00	16.038.325.676,52	34.081.189.241,81	50.119.514.918,33
4.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	4.900.491.000,00	4.900.491.000,00
4.05.03.	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	2.022.728.040,00	2.022.728.040,00
4.07.01.	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	201.094.566,00	2.255.207.192,68	4.258.540.000,00	6.513.747.192,68
4.07.02.	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	25.875.000,00	1.481.845.448,15	1.778.651.600,00	3.260.497.048,15
4.07.03.	KECAMATAN HANAU	115.515.000,00	1.690.430.508,70	2.543.323.000,00	4.233.753.508,70
4.07.04.	KECAMATAN SERUYAN HILIR	47.000.000,00	2.760.874.517,23	6.969.531.738,00	9.730.406.255,23
4.07.05.	KECAMATAN SERUYAN HULU	81.650.000,00	1.865.847.752,85	1.988.797.755,00	3.854.645.507,85
4.07.06.	KECAMATAN BATU AMPAR	84.237.500,00	968.203.172,30	1.984.072.453,00	2.952.275.625,30
4.07.07.	KECAMATAN SERUYAN RAYA	51.175.000,00	1.391.542.103,38	1.832.392.968,81	3.223.935.072,19
4.07.08.	KECAMATAN DANAU SELULUK	38.343.300,00	957.318.707,30	1.822.206.200,00	2.779.524.907,30
4.07.09.	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	28.400.000,00	1.269.731.036,70	2.089.279.487,00	3.359.010.523,70
4.07.10.	KECAMATAN SULING TAMBUN	71.300.000,00	1.397.325.237,23	1.891.175.000,00	3.288.500.237,23
5.	URUSAN LAINNYA	-	1.831.240.741,68	40.424.867.964,00	42.256.108.705,68
5.01.	PENANGGULANGAN BENCANA	-	1.831.240.741,68	40.424.867.964,00	42.256.108.705,68
5.01.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.831.240.741,68	40.424.867.964,00	42.256.108.705,68
5.02.	-	-	-	-	-
5.03.	-	-	-	-	-
5.04.	-	-	-	-	-
5.05.	-	-	-	-	-
5.06.	-	-	-	-	-
Jumlah		1.345.996.782.712,53	564.001.647.974,92	888.073.616.455,50	1.452.075.264.430,42
SURPLUS / (DEFISIT)		(106.078.481.718)			

Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan	Netto
1	2	3	4	5	6
4.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	106.078.481.717,89	-	106.078.481.717,89	-
4.02.	KEUANGAN	106.078.481.717,89	-	106.078.481.717,89	-
4.02.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	106.078.481.717,89	-	106.078.481.717,89	-

Kuala Pembuang, 27 Desember 2019





PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	25.905.373.013,00	208.148.487.641,35	562.808.054.167,92	770.956.541.809,27
1.01.	PENDIDIKAN	29.000.000,00	147.532.593.022,00	109.997.776.570,46	257.530.369.592,46
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	29.000.000,00	147.532.593.022,00	109.997.776.570,46	257.530.369.592,46
1.02.	KESEHATAN	22.376.373.013,00	43.783.333.474,43	122.484.308.735,86	166.267.642.210,29
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	3.008.908.297,00	28.988.417.843,00	72.357.942.984,86	101.346.360.827,86
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA PEMBUANG	8.958.514.405,00	9.515.657.323,80	23.584.075.677,00	33.099.733.000,80
1.02.03.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANAU	10.408.950.311,00	5.279.258.307,63	26.542.290.074,00	31.821.548.381,63
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.500.000.000,00	6.513.384.537,73	289.042.482.839,60	295.555.867.377,33
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.500.000.000,00	6.513.384.537,73	289.042.482.839,60	295.555.867.377,33
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	2.431.292.589,73	20.880.788.200,00	23.312.080.789,73
1.04.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	-	2.431.292.589,73	20.880.788.200,00	23.312.080.789,73
1.05.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	5.554.066.506,68	15.681.841.236,00	21.235.907.742,68
1.05.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	-	3.406.245.148,05	10.926.274.625,00	14.332.519.773,05
1.05.02.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	2.147.821.358,63	4.755.566.611,00	6.903.387.969,63
1.06.	SOSIAL	-	2.333.817.510,78	4.720.856.586,00	7.054.674.096,78
1.06.01.	DINAS SOSIAL	-	2.333.817.510,78	4.720.856.586,00	7.054.674.096,78
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR	1.061.350.000,00	35.893.567.335,28	116.872.572.960,18	152.766.140.295,46
2.01.	TENAGA KERJA	117.600.000,00	2.893.669.181,40	3.567.558.161,91	6.461.227.343,31
2.01.01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	117.600.000,00	2.893.669.181,40	3.567.558.161,91	6.461.227.343,31
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	3.490.679.700,75	9.957.711.131,00	13.448.390.831,75
2.02.01.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	3.490.679.700,75	9.957.711.131,00	13.448.390.831,75
2.03.	PANGAN	6.500.000,00	6.163.515.768,03	18.552.930.920,87	24.716.446.688,90
2.03.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	6.500.000,00	6.163.515.768,03	18.552.930.920,87	24.716.446.688,90
2.04.	PERTANAHAN	-	-	-	-
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP	-	2.842.282.559,00	25.221.472.033,48	28.063.754.592,48

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.05.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	2.842.282.559,00	25.221.472.033,48	28.063.754.592,48
2.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3.435.863.050,13	5.022.358.325,00	8.458.221.375,13
2.06.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	3.435.863.050,13	5.022.358.325,00	8.458.221.375,13
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	2.192.201.926,03	8.335.574.920,00	10.527.776.846,03
2.07.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	2.192.201.926,03	8.335.574.920,00	10.527.776.846,03
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	-
2.09.	PERHUBUNGAN	545.000.000,00	3.085.623.164,35	8.160.422.506,00	11.246.045.670,35
2.09.01.	DINAS PERHUBUNGAN	545.000.000,00	3.085.623.164,35	8.160.422.506,00	11.246.045.670,35
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	2.707.491.565,73	6.442.639.545,00	9.150.131.110,73
2.10.01.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	2.707.491.565,73	6.442.639.545,00	9.150.131.110,73
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	145.000.000,00	2.164.947.785,43	15.769.837.538,00	17.934.785.323,43
2.11.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	145.000.000,00	2.164.947.785,43	15.769.837.538,00	17.934.785.323,43
2.12.	PENANAMAN MODAL	-	2.686.010.741,73	2.878.615.428,92	5.564.626.170,65
2.12.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	2.686.010.741,73	2.878.615.428,92	5.564.626.170,65
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	247.250.000,00	2.735.601.312,50	10.167.633.832,00	12.903.235.144,50
2.13.01.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	247.250.000,00	2.735.601.312,50	10.167.633.832,00	12.903.235.144,50
2.14.	STATISTIK	-	-	-	-
2.15.	PERSANDIAN	-	-	-	-
2.16.	KEBUDAYAAN	-	-	-	-
2.17.	PERPUSTAKAAN	-	1.495.680.580,20	2.795.818.618,00	4.291.499.198,20
2.17.01.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	1.495.680.580,20	2.795.818.618,00	4.291.499.198,20
2.18.	KEARSIPAN	-	-	-	-
3.	URUSAN PILIHAN	70.376.800,00	2.375.134.413,28	17.044.185.446,00	19.419.319.859,28
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	70.376.800,00	2.375.134.413,28	17.044.185.446,00	19.419.319.859,28
3.01.01.	DINAS PERIKANAN	70.376.800,00	2.375.134.413,28	17.044.185.446,00	19.419.319.859,28
3.02.	PARIWISATA	-	-	-	-
3.03.	PERTANIAN	-	-	-	-
3.04.	KEHUTANAN	-	-	-	-
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
3.06.	PERDAGANGAN	-	-	-	-

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.07.	PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
3.08.	TRANSMIGRASI	-	-	-	-
4.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.318.959.682.899,53	315.753.217.843,33	150.923.935.917,40	466.677.153.760,73
4.01.	PERENCANAAN	-	3.172.727.475,08	10.300.250.636,00	13.472.978.111,08
4.01.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	3.172.727.475,08	10.300.250.636,00	13.472.978.111,08
4.02.	KEUANGAN	1.318.010.842.533,53	261.303.615.646,12	31.757.431.120,03	293.061.046.766,15
4.02.01.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.111.993.402.904,78	247.499.971.237,30	27.653.653.358,03	275.153.624.595,33
4.02.02.	BADAN PENGELOLA PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI DAERAH	206.017.439.628,75	13.803.644.408,82	4.103.777.762,00	17.907.422.170,82
4.03.	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	3.880.798.803,00	12.750.313.907,00	16.631.112.710,00
4.03.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	3.880.798.803,00	12.750.313.907,00	16.631.112.710,00
4.04.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-	-	-
4.05.	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	204.250.000,00	28.587.785.985,68	60.637.960.052,56	89.225.746.038,24
4.05.01.	SEKRETARIAT DPRD	-	2.632.290.477,63	32.921.503.900,56	35.553.794.378,19
4.05.02.	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	14.487.871.864,40	-	14.487.871.864,40
4.05.03.	SEKRETARIAT DAERAH	204.250.000,00	10.653.059.528,30	27.716.456.152,00	38.369.515.680,30
4.05.04.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	814.564.115,35	-	814.564.115,35
4.06.	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	2.769.964.256,93	8.320.010.000,00	11.089.974.256,93
4.06.01.	INSPEKTORAT	-	2.769.964.256,93	8.320.010.000,00	11.089.974.256,93
4.07.	PEMERINTAHAN UMUM	744.590.366,00	16.038.325.676,52	27.157.970.201,81	43.196.295.878,33
4.07.01.	KECAMATAN SERUYAN TENGAH	201.094.566,00	2.255.207.192,68	4.258.540.000,00	6.513.747.192,68
4.07.02.	KECAMATAN DANAU SEMBULUH	25.875.000,00	1.481.845.448,15	1.778.651.600,00	3.260.497.048,15
4.07.03.	KECAMATAN HANAU	115.515.000,00	1.690.430.508,70	2.543.323.000,00	4.233.753.508,70
4.07.04.	KECAMATAN SERUYAN HILIR	47.000.000,00	2.760.874.517,23	6.969.531.738,00	9.730.406.255,23
4.07.05.	KECAMATAN SERUYAN HULU	81.650.000,00	1.865.847.752,85	1.988.797.755,00	3.854.645.507,85
4.07.06.	KECAMATAN BATU AMPAR	84.237.500,00	968.203.172,30	1.984.072.453,00	2.952.275.625,30
4.07.07.	KECAMATAN SERUYAN RAYA	51.175.000,00	1.391.542.103,38	1.832.392.968,81	3.223.935.072,19
4.07.08.	KECAMATAN DANAU SELULUK	38.343.300,00	957.318.707,30	1.822.206.200,00	2.779.524.907,30
4.07.09.	KECAMATAN SERUYAN HILIR TIMUR	28.400.000,00	1.269.731.036,70	2.089.279.487,00	3.359.010.523,70
4.07.10.	KECAMATAN SULING TAMBUN	71.300.000,00	1.397.325.237,23	1.891.175.000,00	3.288.500.237,23
5.	URUSAN LAINNYA	-	1.831.240.741,68	40.424.867.964,00	42.256.108.705,68
5.01.	PENANGGULANGAN BENCANA	-	1.831.240.741,68	40.424.867.964,00	42.256.108.705,68

KODE	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.01.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	1.831.240.741,68	40.424.867.964,00	42.256.108.705,68
5.02.	-	-	-	-	-
5.03.	-	-	-	-	-
5.04.	-	-	-	-	-
5.05.	-	-	-	-	-
5.06.	-	-	-	-	-
Jumlah		1.345.996.782.712,53	564.001.647.974,92	888.073.616.455,50	1.452.075.264.430,42
SURPLUS / (DEFISIT)		(106.078.481.718)			

Kuala Pembuang, 27 Desember 2019



Bupati Seruyan

YULHAIDIR